

## **DAMPAK NEGATIF IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN PADA SISWA SEKOLAH DASAR**

Adinda Aulia Bestari<sup>1\*</sup>, Adrias Adrias<sup>2</sup>, Aissy Putri Zulkarnaini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang

<sup>1</sup>[adindabestari2340@gmail.com](mailto:adindabestari2340@gmail.com), <sup>2</sup>[adrias@fip.unp.ac.id](mailto:adrias@fip.unp.ac.id), <sup>3</sup>[aissyputri@unp.ac.id](mailto:aissyputri@unp.ac.id)  
*corresponding author\**

### **ABSTRACT**

*The Independent Curriculum takes a different approach from the previous curriculum, particularly in its assessment system, which focuses more on character building rather than students' academic achievement. The automatic grade promotion policy raises concerns about learning quality, as students advance to the next grade level even if they have not yet mastered essential skills. This study seeks to assess the negative impacts of implementing the Independent Curriculum, especially regarding academic gaps and learning effectiveness in elementary schools. By employing a qualitative method with an interpretative descriptive framework, this research aims to explore teachers' experiences and perspectives in applying the Independent Curriculum. This method allows for a deeper investigation of challenges and policy effects from educators' viewpoints, particularly in relation to academic disparities and learning efficiency. Moreover, the substitution of the National Examination with Askomi Suka is seen as less effective as a final student assessment tool, as this system not only diminishes academic competitiveness but also hampers the equal attainment of competencies. Teachers also encounter various obstacles in implementing project-based learning and maintaining flexible teaching methods, which have yet to be executed effectively.*

**Keywords:** *Independent Curriculum, Automatic Grade Promotion, Character Education, Curriculum Evaluation*

### **ABSTRAK**

Kurikulum Merdeka memiliki pendekatan yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, terutama dalam sistem penilaian yang lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter dibandingkan capaian akademik siswa. Kebijakan kenaikan kelas otomatis menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pembelajaran, karena siswa tetap naik kelas meskipun belum menguasai keterampilan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak negatif dari penerapan Kurikulum Merdeka, khususnya terkait kesenjangan akademik dan efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif untuk memahami pengalaman dan persepsi guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap tantangan serta dampak kebijakan berdasarkan perspektif pendidik, terutama dalam kaitannya dengan kesenjangan akademik dan efektivitas pembelajaran. Selain itu, penggantian Ujian Nasional dengan Askomi Suka dinilai belum optimal sebagai alat asesmen akhir siswa, karena sistem ini tidak hanya menurunkan daya saing akademik, tetapi juga menghambat pencapaian

kompetensi secara merata. Guru juga menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan metode berbasis proyek serta fleksibilitas pembelajaran yang tidak berjalan efektif.

**Kata Kunci:** Kurikulum Merdeka, Kenaikan Kelas Otomatis, Pendidikan Karakter, Evaluasi Kurikulum

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan adalah upaya kritis yang menjadi dasar pembangunan karakter dan pemberdayaan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan berdampak besar pada kemajuan suatu bangsa. Menurut Langeveld dalam (Simanjuntak, 2020), pendidikan merupakan upaya untuk mempengaruhi, melindungi, dan mendukung peserta didik agar mencapai kedewasaan atau dengan kata lain pendidikan bertujuan membantu mereka menjadi individu yang mandiri serta mampu menjalani kehidupannya tanpa bergantung pada orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat krusial dalam membentuk karakter individu dan menjadi kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif serta berkualitas.

Pendidikan yang berkualitas memerlukan perencanaan yang terstruktur dengan baik, salah satunya melalui pengembangan kurikulum yang selaras dengan dinamika zaman. Di Indonesia, perkembangan pendidikan tidak pernah lepas dari pembaruan kurikulum yang terus dilakukan setiap periodenya. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, sebab menjadi dasar dalam penyampaian ilmu kepada peserta didik. Kurikulum merupakan sistem pembelajaran yang dirancang secara terstruktur dan diberikan langsung kepada siswa oleh lembaga

pendidikan sesuai dengan penerapannya (Sarinah, 2015). Selain itu, kurikulum dapat dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran dan program pendidikan yang disusun serta diterapkan oleh lembaga pendidikan dalam suatu jenjang atau periode tertentu. Sedangkan menurut Julaeha (2019), kurikulum merupakan garis besar bahan ajar, serta pedoman perencanaan dan penetapan. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengalami sepuluh kali perubahan kurikulum yaitu, pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, dan 2013 (Rahmadhani et al., 2022). Perubahan ini dilakukan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik, sehingga sistem pembelajaran dapat lebih efektif dalam membentuk individu yang kompeten dan bernilai daya saing tinggi.

Sebagai bagian dari upaya pembaruan, pemerintah merancang Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan melalui Permendikbud Nomor 3 sampai 7 Tahun 2020. Kurikulum ini memberikan beberapa perubahan mendasar, seperti penghapusan Ujian Nasional yang digantikan dengan Asesmen

Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (Askomi Suka), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi satu halaman, serta fleksibilitas dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan zonasi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik.

Penerapan Kurikulum Merdeka memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan kreativitas, komunikasi, dan kemandirian siswa. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pendidik dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik serta kebutuhan siswa. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, fleksibel, dan adaptif, guna meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh serta menghasilkan tenaga pendidik yang lebih kompeten.

Kurikulum Merdeka mulai disusun pada tahun 2020 sebagai bentuk respons pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang mengubah dinamika pembelajaran secara drastis. Kurikulum Merdeka mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2021 dengan menekankan fleksibilitas dalam proses pembelajaran serta memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik siswa. Kurikulum Merdeka menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memungkinkan peserta didik menyesuaikan gaya belajar mereka berdasarkan kemampuan serta minat individu (Sarinah, 2015).

Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kendala atau tantangan yang signifikan bagi pendidik dan peserta didik, terutama dalam hal efektivitasnya secara praktis. Salah satu kendala yang timbul adalah kebijakan pendidikan di Indonesia yang sering kali mengalami

perubahan tanpa adanya perencanaan yang matang, sehingga reformasi kurikulum yang terjadi tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Pergantian dan perubahan kurikulum yang terlalu sering justru menimbulkan kebingungan di kalangan pendidik dan peserta didik, menghambat konsistensi sistem pembelajaran, serta berpotensi menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam Kurikulum Merdeka adalah efektivitas Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (Askomi Suka) yang menggantikan Ujian Nasional (UN). Beberapa pihak berpendapat bahwa metode Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (Askomi Suka) dinilai kurang akurat dalam mengukur pencapaian akademik siswa (Mabsutsah & Yushardi, 2022). Selain itu, adanya kebijakan kenaikan kelas tanpa mempertimbangkan keterampilan dasar siswa juga menjadi hambatan dan tantangan besar dalam implementasi kurikulum ini. Banyak peserta didik yang belum memiliki keterampilan dasar, tetapi tetap naik

ke kelas berikutnya, yang pada akhirnya akan menciptakan masalah dalam kualitas pembelajaran dan pencapaian akademik siswa (Ningtyas & Juliantari, 2022).

Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan evaluasi dan perbaikan yang mendalam dan berkelanjutan agar Kurikulum Merdeka dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tanpa adanya strategi implementasi yang matang dan dukungan yang memadai bagi para pendidik, kebijakan ini berisiko tidak berjalan sesuai harapan dan justru akan menimbulkan banyak permasalahan baru dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Indonesia dengan menyajikan rekomendasi untuk perbaikan efektivitas Kurikulum Merdeka. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam pendidikan dasar, sehingga dapat menjadi acuan bagi pendidik dalam merancang strategi yang adaptif dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan.

## **B. Metode Penelitian**

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Menurut Abdussamad (2021), metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih berfokus pada makna daripada generalisasi. Metode kualitatif dalam penelitian ini merujuk pada metode yang proses pengumpulannya dilakukan tanpa menerapkan prosedur statistik atau kuantifikasi. Oleh karena itu, pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi di dalam implementasi Kurikulum Merdeka, dengan menekankan pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan perspektif para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Dengan menggunakan analisis deskriptif, kajian ini berupaya menyajikan pemahaman yang lebih

luas dan mendalam terkait dinamika penerapan Kurikulum Merdeka di lingkungan pendidikan.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara sebagai metode utama. Wawancara terstruktur dilakukan dengan seorang guru di SDN 33 Rawang Barat yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada pengalaman guru dalam mengimplementasikan kurikulum, tantangan yang dihadapi selama proses penerapan, serta dampaknya terhadap pembelajaran di kelas.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar masih menemui beragam kendala, terutama dalam kesiapan tenaga pendidik yang menjadi fasilitator dan efektivitas metode pembelajaran. Transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam hal pelatihan dan bimbingan yang diterima oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara, kesiapan guru masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Guru yang diwawancarai menyatakan bahwa penerapan

Kurikulum Merdeka baru dimulai pada tahun 2024. Selama proses transisi, tidak ada arahan langsung dari pihak sekolah, sementara pelatihan yang diberikan melalui workshop dinilai kurang intensif. Hal ini menyebabkan pemahaman guru terhadap sasaran, struktur, dan tujuan spesifik Kurikulum Merdeka masih terbatas. Studi yang dikemukakan oleh Hartoyo et al. (2023) juga mengungkapkan bahwa banyak guru mengalami kesulitan dalam memahami kebijakan kurikulum baru akibat kurangnya pelatihan yang memadai. Selain itu, perubahan metode pembelajaran yang menekankan pendekatan berbasis praktik juga menghadirkan tantangan baru. Siswa yang lebih aktif dalam kegiatan praktik tidak selalu fokus memahami materi, sehingga efektivitas pembelajaran menjadi kurang optimal. Kurangnya strategi pengawasan serta evaluasi yang kurang tepat semakin menghambat efektivitas pembelajaran. Pernyataan tersebut seiring dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Sartika et al. (2024), yang menekankan pentingnya manajemen kelas yang optimal dan sistem asesmen yang lebih efektif

dalam mendukung keberhasilan proses belajar.

Selain tantangan bagi tenaga pendidik, kebijakan penyederhanaan RPP menjadi satu halaman juga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembelajaran. RPP yang terlalu ringkas dianggap kurang mampu mengakomodasi kompleksitas metode pembelajaran berbasis praktik, terutama dalam memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran secara sistematis. Penelitian oleh Setiyojuliani & Andaryani (2023) menunjukkan bahwa penyederhanaan RPP dapat mengurangi efektivitas perencanaan pembelajaran karena menghilangkan banyak aspek penting dalam strategi pengajaran. Meskipun kebijakan ini bertujuan mengurangi beban administrasi guru, namun dalam praktiknya justru menghambat penyusunan strategi pembelajaran yang efektif. Akibatnya, fleksibilitas metode pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menjadi terbatas dibandingkan kurikulum sebelumnya.

Dampak Kurikulum Merdeka terhadap fleksibilitas metode pembelajaran menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji lebih lanjut. Kebebasan dalam menentukan

metode pembelajaran ternyata lebih terbatas dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka menitikberatkan pada pembentukan karakter dan pembelajaran berbasis praktik, sehingga pendekatan yang diterapkan harus selaras dengan prinsip tersebut. Sementara itu, Kurikulum 2013 dan KTSP memungkinkan penerapan metode pembelajaran yang lebih beragam dengan fokus yang seimbang antara penguasaan pengetahuan akademik dan pengembangan karakter.

Implementasi Kurikulum Merdeka juga berpengaruh terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. Pendekatan berbasis praktik dapat meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, namun tidak secara signifikan meningkatkan capaian akademik siswa. Fokus utama kurikulum ini lebih menitikberatkan pada pengembangan keterampilan dan karakter, sehingga daya saing akademik menjadi kurang kompetitif. Berbeda dengan Kurikulum KTSP yang menurut responden lebih berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan dinilai lebih efektif dalam mendorong prestasi akademik. Oleh karena itu,

diperlukan keseimbangan antara pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan pencapaian akademik guna memastikan kualitas pendidikan tetap optimal.

Salah satu kebijakan dalam Kurikulum Merdeka adalah penerapan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (Askomi Suka) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Berdasarkan hasil wawancara, responden menilai bahwa asesmen ini belum efektif dalam mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Bahkan menurut responden, masih banyak guru yang kesulitan dalam memahami mekanisme penilaian karakter yang diterapkan dalam kurikulum ini. Selain itu, evaluasi karakter dalam Askomi Suka terbatas pada lingkungan sekolah saja, tanpa adanya pertimbangan faktor eksternal seperti lingkungan keluarga ataupun sosial. Keterbatasan cakupan asesmen ini, berpotensi mengurangi objektivitas dalam menilai perkembangan siswa. Berbeda dengan UN yang berorientasi pada penguasaan akademik, Askomi Suka justru lebih menitikberatkan pada aspek karakter, sehingga hal ini

belum bisa sepenuhnya menggantikan fungsi UN dalam menilai kompetensi akademik secara kuantitatif.

Kebijakan yang memberikan kebebasan bagi siswa dalam memilih materi pembelajaran juga menimbulkan tantangan tersendiri. Meskipun bertujuan meningkatkan fleksibilitas, kebijakan ini berisiko menciptakan ketimpangan dalam penguasaan materi, karena setiap siswa memiliki preferensi berbeda terhadap mata pelajaran yang diminati. Beberapa siswa ada yang tertarik pada Matematika, sedangkan siswa yang lainnya lebih tertarik pada IPAS ataupun Sejarah, sehingga menciptakan kesenjangan dalam pemahaman antarmata pelajaran. Kondisi ini akan menyulitkan pengelolaan kelas, karena tidak semua siswa memiliki tingkat pemahaman yang merata. Jika tidak diimbangi dengan strategi pembelajaran yang tepat, perbedaan dalam penguasaan materi dapat semakin melebar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Kebijakan kenaikan kelas otomatis dalam Kurikulum Merdeka menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas pembelajaran.



Mekanisme ini dianggap kurang efektif karena memungkinkan siswa dengan motivasi belajar rendah untuk tetap naik kelas tanpa mempertimbangkan pencapaian akademik mereka. Akibatnya, siswa berpotensi menjadi kurang termotivasi dalam belajar, karena tidak ada konsekuensi akademik yang jelas bagi mereka yang belum mencapai kompetensi minimal. Selain itu, peserta didik yang menghadapi hambatan dalam memahami materi berisiko semakin tertinggal di jenjang berikutnya, sehingga memperlebar kesenjangan dalam penguasaan akademik.

Penerapan Kurikulum Merdeka pada kelas rendah (kelas 1–3 SD) menghadapi tantangan dalam meningkatkan kompetensi dasar siswa, terutama dalam membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Kurikulum yang berfokus pada penguatan karakter ini dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memastikan penguasaan keterampilan dasar. Responden mengungkapkan bahwa menjelang kenaikan kelas, hampir setengah dari siswa kelas 1 di sekolah tempatnya mengajar masih mengalami kesulitan dalam membaca dengan lancar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan belum optimal dalam membangun kemampuan fundamental yang esensial bagi perkembangan akademik siswa.

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tidak secara langsung menghambat pembelajaran akademik, namun tetap menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan yang muncul adalah keluhan dari orang tua yang merasa perlu mendaftarkan anak mereka ke bimbingan belajar (bimbel) demi memastikan peningkatan kompetensi akademik yang tidak mereka dapatkan secara penuh di sekolah. Selain itu, beban finansial tambahan juga menjadi perhatian, terutama terkait biaya untuk menyewa atribut budaya dalam kegiatan tematik, seperti tanduak bundo kandung pada siswi dan deta pada siswa. Di sisi lain, implementasi P5 di sekolah masih menghadapi ketidakkonsistenan, di mana sebagian guru mengintegrasikannya ke dalam seluruh mata pelajaran, sementara guru yang lain hanya menerapkannya pada mata pelajaran tertentu.

Implementasi Kurikulum

Merdeka di sekolah dasar, terutama di kelas rendah, menghadapi tantangan yang signifikan. Menurut responden, fokus utama kurikulum ini terletak pada penilaian karakter dan kegiatan proyek yang membuat pembelajaran akademik berlangsung kurang optimal. Jika keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung tidak dikuasai dengan baik, maka siswa akan mengalami kesulitan saat naik ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan agar penguatan karakter tidak mengorbankan penguasaan kompetensi akademik dasar.

Sebagai refleksi atas penerapan Kurikulum Merdeka, beberapa aspek dinilai perlu disesuaikan kembali dengan metode yang lebih efektif. Salah satu usulan yang diajukan oleh responden adalah mengintegrasikan elemen dari Kurikulum KTSP, terutama dalam hal memperkuat kompetensi akademik. Kurikulum KTSP umumnya lebih menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar, sehingga dapat mendorong persaingan akademik yang lebih sehat di antara siswa.

**D. Kesimpulan**

Penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar masih menemui beragam hambatan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Beberapa kendala utama meliputi efektivitas Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (Askomi Suka) yang belum optimal dalam mengukur kompetensi siswa secara menyeluruh, ketimpangan penguasaan materi akibat kebijakan fleksibilitas dalam pembelajaran, serta dampak kenaikan kelas otomatis yang berpotensi menurunkan standar akademik. Selain itu, pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) turut memengaruhi alokasi waktu pembelajaran akademik siswa, sehingga keseimbangan antara penguatan karakter dan pencapaian akademik menjadi isu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini sangat diperlukan agar fleksibilitas pembelajaran dapat berjalan seimbang dengan penguatan kompetensi akademik. Reformulasi kebijakan yang mempertimbangkan kesiapan guru, karakteristik siswa, serta kondisi infrastruktur pendidikan menjadi langkah penting untuk

memastikan implementasi Kurikulum Merdeka lebih optimal dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, pendidik, serta masyarakat menjadi kunci dalam memastikan kurikulum ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta didik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Hartoyo, A., Melati, R., & Martono, M. (2023). Dampak Perubahan Kurikulum Merdeka Dan Kesiapan Tenaga Pendidik Terhadap Penyesuaian Pembelajaran Di Sekolah. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 412–428.  
<https://doi.org/10.31932/jpdp.v9i2.2773>
- Julaeha, S. (2019). Kurikulum di negara Brunei Darussalam tidak jauh beda dengan kurikulum yang ada di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 157.
- Mabsutsah, N., & Yushardi, Y. (2022). Analisis Kebutuhan Guru terhadap E Module Berbasis STEAM dan Kurikulum Merdeka pada Materi Pemanasan Global. *Jurnal Pendidikan Mipa*, 12(2), 205–213.  
<https://doi.org/10.37630/jpm.v12i2.588>
- Ningtyas, P. D. A. M., & Juliantari, N. K. (2022). Dampak Implementasi Kurikulum Merdeka Terhadap Pengembangan Potensi Peserta Didik. *Jayapangus Press Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(4), 329–341.
- Rahmadhani, P., Widya, D., & Setiawati, M. (2022). Dampak Transisi Kurikulum 2013 Ke Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Minat Belajar Siswa. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 41–49.  
<https://doi.org/10.57218/jupeis.vol1.iss4.321>
- Sarinah. (2015). *Pengantar Kurikulum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sartika, S. M., Istiningsih, S., Novitasari, S., & Makki, M. (2024). Analisis Kesulitan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Pengengat. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 5016–5027.
- Setiolyuliani, S. E. P., & Andaryani, E. T. (2023). Permasalahan Kurikulum Merdeka dan Dampak Pergantian Kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 157–162.  
<https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1123>
- Simanjuntak, J. W. (2020). Sisi Gelap Merdeka Belajar - Merdeka Belajar Dan Dampak Negatifnya Kepada Seni. *Seminar Nasional Seni Dan Desain: "Reorientasi Dan Implementasi Keilmuan Seni Rupa Dan Desain Dalam Konteks Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka(MBKM),"* 193–197.